I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan akan kepastian hukum serta penegakan hukum yang baik demi terwujudnya ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas. Jaminan ini adalah tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan dari masyarakat. Karena Hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial .

Manusia didalam pergaulan sehari-hari tidak dapat terlepas dari interaksi dengan manusia lain, hal ini sudah sepantasnya karena manusia pada kodratnya adalah mahluk sosial. Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing sehingga mereka selalu dan akan memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam interaksi tersebut, akan banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan antara masing-masing individu. Perbedaan yang semakin meruncing antara individu kemudian dapat memicu timbulnya konflik individu.

Perbedaan-perbedaan ini sebenarnya dapat dipahami karena pada hakekatnya manusia antara satu dengan yang lain tidak memiliki persamaan. Yang menjadikan masalah adalah bagaimana individu-individu itu menaggapinya, terkadang individu-individu tersebut melibatkan emosi dalam menyelesaikan masalahnya. Mereka yang terlibat dalam konflik seringkali tidak dapat menahan diri, sehingga sering kali terlepas ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan bahkan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kemerdekaan orang lain atau sering kita kenal dengan “perbuatan tidak menyenangkan”. Perbuatan tidak menyenangkan ini seringkali lebih disebabkan oleh karena para individu tersebut terbawa emosi sehingga mereka lupa telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan.

Perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya, jika perbuatan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut. Memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh korban, atau korban mengalami sakit hati (perasaan). Berarti dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorang, oleh karena itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap “kemerdekaan orang”.

Sebagai contoh ialah putusan perkara No.49/Pid.B/2009/PN.GS. Dimana majelis hakim memvonis Wahyu Bintoro melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, dengan

hukuman penjara selama delapan bulan. Majelis hakim menganggap Wahyu Bintoro telah dengan sengaja melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada korban Rubiyanto, dengan cara menyentil mata korban dan berkata dengan nada emosi dihadapan banyak orang. Disini dapat dilihat bahwa sebenarnya perbuatan yang memaksakan sesuatu kepada orang lain, dengan kekerasan secara fisik agar orang lain tersebut mengakui sesuatu yang diperbuatnya atau pun tidak diperbuatnya adalah termasuk tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi dalam Putusan perkara Nomor.49/Pid.B/2009/PN.GS Jaksa dalam dakwaannya telah melakukan kekeliruan dalam menentukan pasal dakwaan. Jaksa menganggap perbuatan terdakwa termasuk dalam Pasal 335 ayat(1) karena terdakwa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yaitu menyentil mata korban dan berkata kasar. Padahal inti dari Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah melakukan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dan melakukan sesuatu paksaan dengan memakai ancaman kekerasan. Pasal 335 ayat (1) KUHP dikenal sebagai suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dalam arti khusus karena perbuatan tersebut hanyalah sebatas perbuatan yang memaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau dengan ancaman kekerasan saja tetapi kekerasan tersebut belum terjadi.

Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ke-1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang

tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke-2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

- 2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pada Pasal ini yang harus dibuktikan adalah:

Ke-1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.

Ke-2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan KUHP dengan mengambil judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Perkara No.49/Pid.B/2009/PN.GS)”.

B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam hal ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan dalam studi putusan perkara No.49/Pid.B/2009/PN.GS. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Gunung sugih.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku pidana perbuatan tidak menyenangkan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak penegak hukum dalam hal ini ialah

majelis hakim dalam memberikan putusannya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak menyenangkan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian, (Soerjono Soekanto, 1998: 125).

Tindakan yang menyerang kemerdekaan atau kebebasan seseorang adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, atau tindakan pidana yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kemerdekaan atau kebebasan seseorang adalah merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM). Salah satu contoh pelanggaran terhadap kemerdekaan atau kebebasan seseorang yang sering kita dengar adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

Setiap tindak pidana yang terjadi akan selalu mendapatkan sanksi hukum yang tegas, baik tindak pidana yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Bedanya pada kejahatan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat bila dibandingkan pada pelanggaran. Hal ini disebabkan karena efek atau sebab yang ditimbulkan berbeda.

Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dipidana karena sesuai asas tiada tanpa kesalahan "*Nulla Foena Sinna Culva (Green Straff Zonder Schuld)*", yang artinya adalah untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Istilah "*Schuld*" yang diartikan dengan "kesalahan" dikemukakan oleh Andi Hamzah (2000 : 77) yang mengutip dari pendapat Simon yang dirumuskan sebagai berikut :

"Kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya".

Menurut pendapat Pompe (Roeslan Saleh, 1983: 77) yang di rumuskan sebagai berikut :

"Kesalahan ini dapat dicela (*verwilt baarheid*) dan dapat dihindari perbuatan yang dilakukan itu (*vermijd baarheid*)".

Menurut Andi Hamzah (2000 : 79) mengutip pendapat Moeljatno bahwa untuk adanya kesalahan yang menyebabkan dipidananya terdakwa harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
- c. Berupa kesalahan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Suharto R.M. (1996 : 106) kesalahan merupakan suatu pengertian psikologis karena dasar kesalahan dicari hubungan batin orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian orang beranggapan bahwa kesalahan dalam hukum pidana adalah sama dengan kesengajaan dan kealpaan, yang berarti ada hubungan batin antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.

Kesalahan dan Pertanggungjawaban pidana dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas (Andi Hamzah, 1991 : 130), yaitu :

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (*culpa*)
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya di pertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam KUHP saat ini belum diberikan rincian secara jelas mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana, melainkan hanya merupakan aturan pemberian pidana yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kedudukan hakim sebagai pelaksana keadilan ditunjang dari pengetahuan yang cukup tentang pembedaan terutama untuk mencapai pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana. berkenaan dengan penjatuhan pidana.

Adapun pedoman penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dicantumkan dalam konsep KUHP 2008 Pasal 55 Ayat (1) yaitu sebagai berikut :

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya.

Peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan adanya pedoman penjatuhan pidana tersebut, sebab di dalam undang-undang hanya menetapkan hukuman minimum dan maksimum

saja. Namun kebebasan hakim tersebut bukanlah merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah, (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan saleh, 1981:75).
- b. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya, (Andi Hamzah, 1994:88).
- c. Perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan (KUHP Pasal 335 ayat (1)).
- d. Pelaku adalah Orang yang melakukan suatu perbuatan (Roeslan Saleh, 1983:3).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh dalam skripsi ini.

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar terhadap pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang dalam hal ini adalah pengertian tentang pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian hukum pidana, serta pengertian perbuatan tidak menyenangkan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan tidak menyenangkan dan

pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.